

Wawasan pengembangan kebijakan pendidikan

Siti Nur Halimah¹, Rahma Romadhoni²

program studi Pendidikan Bahasa Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: h693294@gmail.com, yamayomado@gmail.com

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan, Desentralisasi Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Pemerataan dan Mutu Pendidikan, Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Keywords:

Education Policy, Educational Decentralization, Policy Implementation, Equity and Quality in Education, Education Policy Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dalam mengatasi tantangan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Fokus utama penelitian ini adalah pada ketimpangan akses, kualitas pendidikan yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta proses perumusan kebijakan yang kurang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Penelitian ini mengidentifikasi peluang dan prinsip dasar untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal di daerah 3T, sehingga meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan faktor internal seperti kurikulum, kapasitas pendidik, serta infrastruktur pendidikan, dan juga faktor eksternal seperti kondisi politik, ekonomi, serta pengaruh globalisasi. Landasan etika yang bersumber dari nilai-nilai spiritual dan sosial, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, perlu menjadi bagian integral dalam pembangunan kebijakan

ABSTRACT

This research aims to analyze and develop education policy in Indonesia, particularly in addressing challenges within 3T regions (terdepan, terluar, and tertinggal – foremost, outermost, and disadvantaged areas). The primary focus of the study is on access inequality, low quality of education, infrastructure limitations, and policy formulation processes that inadequately involve local stakeholders. The research identifies opportunities and fundamental principles for creating policies that are more inclusive, adaptive, participatory, and sustainable. The findings are expected to provide concrete recommendations for improving education policies that are responsive to local needs in 3T areas, thereby enhancing overall equity and quality of education. Appropriate policies must consider internal factors such as curriculum, educator capacity, and educational infrastructure, as well as external factors such as political and economic conditions, and the influence of globalization. An ethical foundation derived from spiritual and social values, such as justice, responsibility, and respect for knowledge, needs to be an integral part of policy development.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan merupakan salah satu sarana strategis dalam membentuk tatanan sosial suatu bangsa. Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang sangat cepat, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin rumit. Tantangan tersebut mencakup ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya kualitas pembelajaran, terbatasnya sarana dan prasarana, serta perlunya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman.

Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang efisien dan adil. Dengan kebijakan, pemerintah dapat menetapkan tujuan, arah, serta pendekatan dalam mengembangkan sektor pendidikan. Proses perumusan kebijakan ini seharusnya dilandasi oleh analisis menyeluruh terhadap situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat, serta harus mengedepankan prinsip inklusivitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Tanpa adanya kebijakan yang terstruktur dengan baik, implementasi pendidikan bisa berjalan tanpa fokus yang jelas dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, berbagai peraturan dan program pendidikan telah disusun, mulai dari undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, kurikulum yang berlaku, hingga inisiatif strategis seperti merdeka belajar, program Indonesia Pintar, dan transformasi digital dalam sekolah. Meskipun demikian, penerapan kebijakan-kebijakan ini sering kali tidak mencapai hasil yang optimal. Banyak kebijakan yang bersifat top-down, kurang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal, atau bahkan tidak didukung oleh sumber daya yang cukup. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan kebijakan pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta berkelanjutan agar dapat mengatasi tantangan nyata yang ada di lapangan. Artikel ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai wawasan dalam pengembangan kebijakan pendidikan, dimulai dari konsep dasar, prinsip-prinsip perumusan kebijakan, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat tercipta kebijakan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan hasil evaluasi terhadap sistem nilai serta kebutuhan kontekstual yang berlaku dalam suatu institusi, yang diformulasikan sebagai rencana strategis guna menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal (Umar Sidiq, M.Ag Wlwin Widyawati, 2019). Atau dapat diartikan serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh otoritas yang berwenang (pemerintah, lembaga pendidikan, atau otoritas lokal) guna mengatur arah, tujuan, dan pelaksanaan sistem pendidikan. Kebijakan ini bertindak sebagai pedoman untuk mewujudkan kualitas, pemerataan, serta relevansi pendidikan bagi seluruh masyarakat. Menurut Leslie Pal (1992), kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan adalah "serangkaian tindakan atau ketidaktindakan yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi suatu persoalan." Dalam pendidikan, ini berarti

kebijakan menjadi alat untuk mengatasi tantangan seperti kesenjangan akses, mutu guru, dan relevansi kurikulum.

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pada Tingkat Nasional, Regional, Dan Satuan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan Tingkat Nasional

Kebijakan pendidikan nasional di Indonesia berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum yang mengatur arah dan struktur pendidikan nasional, didukung oleh berbagai peraturan turunan untuk menjamin mutu, pemerataan, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Imam Rohani, 2020). Beberapa kebijakan strategis nasional antara lain:

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003): Menjadi dasar hukum utama yang mengatur tujuan, prinsip, dan sistem pendidikan nasional.
2. Peta Jalan Pendidikan 2025-2045: Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan peta jalan ini sebagai pedoman utama kebijakan pendidikan nasional hingga 2045, yang memuat tujuh arah kebijakan, di antaranya:
 - a) Perluasan program pendidikan selama 13 tahun, mencakup satu tahun pendidikan prasekolah serta dua belas tahun pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan sistematis.
 - b) Penyediaan akses yang merata terhadap pendidikan tinggi yang bermutu, serta penguatan pendekatan pembelajaran berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
 - c) Penguatan mutu proses belajar-mengajar melalui peningkatan kualitas metode pengajaran dan hasil pembelajaran.
 - d) Pembenahan sistem tata kelola pendidikan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
 - e) Peningkatan daya saing lulusan dengan memperkuat keterampilan kerja, produktivitas, dan kesiapan menghadapi dunia kerja.
 - f) Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara profesional guna mendukung proses pendidikan yang optimal.
 - g) Penyediaan layanan pendidikan berbasis pesantren dan keagamaan dengan standar kualitas yang tinggi dan inklusif.
3. Kebijakan Merdeka Belajar: Memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran dan penilaian.
4. Program Indonesia Pintar, BOS, dan digitalisasi sekolah: Mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Kebijakan nasional mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi sebagai pijakan utama bagi perguruan tinggi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan layanan akademik sesuai standar nasional. Melalui regulasi seperti **Permendikbudristek Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, pemerintah menetapkan kerangka mutu yang wajib diterapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Aturan tersebut mengatur proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu secara terus-menerus. Merujuk Peraturan menteri tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek, 2023) menyebutkan “(ayat 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, (ayat 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, (ayat 4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin.” kebijakan ini menjadi acuan strategis bagi PTKIN-BLU untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang transparan, efisien, serta mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan global (Esha, 2016). Kebijakan nasional juga menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum inti, akreditasi, serta pengelolaan pendidikan tinggi yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kebijakan Pendidikan Tingkat Regional (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Pada tingkat regional, pelaksanaan kebijakan pendidikan dilakukan sesuai dengan prinsip desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014, di mana pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar, sementara pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah. Pemerintah daerah mengatur anggaran pendidikan dan mengembangkan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Meski demikian, desentralisasi sering menghadirkan tantangan berupa ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah, khususnya di daerah kepulauan (Ariyanto, 2020). Kebijakan di tingkat regional merupakan implementasi desentralisasi pendidikan, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pembagian Kewenangan:

1. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, serta jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.
2. Sementara itu, pengelolaan pendidikan menengah seperti SMA dan SMK, termasuk pendidikan khusus, merupakan wewenang pemerintah provinsi.

Manajemen Pendidikan Daerah:

1. Pemerintah daerah berwenang dalam manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum muatan lokal, distribusi dan pemindahan guru, serta perizinan pendirian satuan pendidikan sesuai jenjangnya.

2. Pemerintah daerah juga mengelola anggaran pendidikan yang dialokasikan dari pusat melalui transfer daerah, yang jumlahnya lebih dari 60% dari total anggaran pendidikan nasional.

Kebijakan Spesifik Daerah:

1. Contoh di beberapa daerah adalah kebijakan pendidikan gratis, penguatan pendidikan karakter berbasis lokal, hingga program revitalisasi sekolah dan peningkatan infrastruktur pendidikan.
2. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, misalnya melalui penetapan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan kearifan lokal.

Namun, implementasi desentralisasi pendidikan juga menghadapi tantangan, seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Penelitian di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan, kenyataannya juga dapat membuka ruang disparitas pendidikan, terutama di daerah kepulauan seperti Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Hal ini disebabkan oleh pola kebijakan pendidikan yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan spasial dengan skala prioritas pendidikan daerah sentra dan pendekatan struktural melalui lobi-lobi politik elit struktural dalam birokrasi pendidikan di daerah (Bida, 2021).

Kebijakan Pendidikan di Tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah)

Sekolah memiliki peran penting dalam menjalankan kurikulum nasional dan muatan lokal, mengelola proses belajar-mengajar serta sumber daya, dan melakukan evaluasi internal guna meningkatkan mutu pendidikan (Kurniawan et al., 2022). Selain itu, sekolah dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal seperti program pencegahan bullying dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Namun, di lapangan, tantangan yang muncul berupa keterbatasan pelatihan guru, sarana prasarana yang kurang memadai, serta perbedaan pemahaman kebijakan di kalangan tenaga pendidik. Implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sangat menentukan keberhasilan sistem pendidikan secara keseluruhan, seperti:

Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran:

Sekolah melaksanakan kurikulum nasional dan/atau kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta pengembangan program-program inovatif sesuai kebutuhan peserta didik.

Pengelolaan Sumber Daya:

Kepala sekolah mengelola anggaran BOS, sarana prasarana, serta pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Sekolah melakukan evaluasi internal (evaluasi diri sekolah) untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Penerapan Kebijakan Khusus:

Sekolah dapat mengembangkan kebijakan berbasis sekolah, seperti program anti-bullying, penguatan pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan lingkungan belajar yang inklusif.

Sinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat:

Sekolah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan pendidikan di sekolah juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi guru, keterbatasan fasilitas, dan pemahaman yang beragam di antara guru. Penelitian di SMANegeri 3 Singaraja menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan, sumber daya, dan pemahaman yang beragam di antara guru, serta keterbatasan fasilitas fisik yang belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas siswa berkebutuhan khusus (Subhan Widiandy et al., 2024).

Fungsi Kebijakan Pendidikan

Sebagai pedoman pengambilan keputusan

Kebijakan memberi kerangka berpikir dan arah tindakan bagi pengelola pendidikan untuk menyusun strategi, menetapkan anggaran, dan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat.

Sebagai dasar pelaksanaan program pendidikan

Contoh nyatanya adalah Program Indonesia Pintar, Kurikulum Merdeka, dan bantuan operasional sekolah. Semua itu merupakan implementasi dari kebijakan yang dirancang demi tercapainya pemerataan dan mutu pendidikan.

Sebagai alat evaluasi dan pengawasan

Kebijakan digunakan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan suatu program pendidikan, baik secara kuantitatif (angka partisipasi, kelulusan) maupun kualitatif (kepuasan, penguasaan kompetensi). Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh keada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). Ayat ini menjadi dasar bahwa kebijakan termasuk dalam pendidikan berfungsi untuk mengarahkan masyarakat pada kebaikan dan kemajuan bersama. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

مَنْ وَلَّى أَمْرَ النَّاسِ فَلْيُؤَدِّهِمْ بِالْعَدْلِ

"Barang siapa yang mengatur urusan manusia, hendaklah ia melakukannya dengan adil." (HR. Ahmad)

Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam menyusun dan menjalankan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.

Prinsip dan Tujuan Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Prinsip-prinsip Dasar dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan pijakan prinsip yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan relevansi terhadap kondisi masyarakat. Beberapa prinsip penting yang menjadi landasan adalah:

Inklusivitas

Salah satu pilar utama dalam pendidikan modern adalah keterbukaan terhadap semua kalangan. Artinya, kebijakan yang dibuat harus memungkinkan siapa pun tanpa membedakan latar belakang suku, gender, atau kondisi fisik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur'an:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَغْدِلُوۡا ۖ اِعْدِلُوۡا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

"...dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."(QS. Al-Ma'idah: 8)

Pemerataan

Pendidikan harus menyentuh seluruh wilayah, baik pusat maupun daerah pinggiran. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal hanya karena faktor geografis atau ekonomi. Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh latar belakangnya. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur'an:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ

"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa."(QS. Al-Hujurat: 13)

Efisiensi dan Efektivitas

Kebijakan tidak cukup hanya baik secara ide, tetapi juga harus praktis, hemat sumber daya, dan tepat sasaran. Dengan manajemen yang cermat, kebijakan dapat menghasilkan dampak besar dengan pengorbanan yang minimal. Menurut Thomas Dye (1972), kebijakan publik yang berhasil adalah kebijakan yang mampu memberi solusi nyata melalui tindakan yang terencana dan dapat dilaksanakan secara logis.

Berkelanjutan

Pendidikan tidak boleh hanya menjawab kebutuhan sesaat. Perencanaan kebijakan harus mencakup pembinaan jangka panjang, agar pendidikan tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Tujuan Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dibentuk untuk mencapai tujuan yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia Indonesia. Beberapa sasaran utamanya meliputi:

Meningkatkan Mutu Pendidikan

Salah satu prioritas utama adalah memperbaiki kualitas proses belajar mengajar, termasuk peningkatan kapasitas guru, kurikulum, serta lingkungan belajar. Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ
(رواه الطبرني والبيهقي)

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, ia menyempurnakannya.”(HR. Thabrani, Baihaqi). Ini menjadi dasar bahwa kualitas (itqan) adalah nilai luhur dalam segala bentuk amal, termasuk dalam sistem pendidikan.

Memperluas Akses Pendidikan

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pendidikan untuk seluruh warga negara. Hal ini diperkuat dalam konstitusi bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh status ekonomi, letak geografis, atau kondisi lainnya. Seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan..."

Meningkatkan Relevansi Pendidikan

Kebijakan pendidikan harus selaras dengan kebutuhan nyata di masyarakat, termasuk perkembangan industri, teknologi, dan kehidupan sosial. Pendidikan harus menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman. Prof. Tilaar (1998) mengemukakan bahwa pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global, bukan sekadar mengikuti rutinitas lama yang stagnan.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan

Dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi arah kebijakan tersebut. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, keberhasilan kebijakan pendidikan juga sangat bergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Faktor Internal

Faktor internal berkaitan langsung dengan elemen-elemen di dalam sistem pendidikan itu sendiri, di antaranya:

Kurikulum

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan. Perubahan kebijakan kurikulum biasanya mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kurikulum menentukan apa yang diajarkan, bagaimana disampaikan, serta keterampilan apa yang ditargetkan kepada peserta didik. “Jangan paksaan anak-anakmu mengikuti jejakmu, mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan zamanmu” Kutipan ini ditulis oleh Imam Ahmad al-Syahrastani dalam kitabnya yang sangat masyhur terkait sejarah aliran-aliran pemikiran yang hingga saat ini masih menjadi rujukan, al-Milal wa al-Nihal (1404, juz 2: 82)

Pendidik

Guru merupakan ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Kompetensi, dedikasi, dan kesejahteraan guru sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Rasulullah bersabda:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
رواه البخاري »

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.”(HR. Bukhari). Hadist ini menunjukkan pentingnya peran pendidik dalam menyebarkan ilmu dan nilai-nilai moral.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, dan teknologi pendidikan menjadi faktor penentu kualitas proses pembelajaran. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan seringkali gagal di tingkat implementasi.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah unsur-unsur di luar sistem pendidikan yang memengaruhi arah dan isi kebijakan pendidikan, antara lain:

Politik

Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh orientasi dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya, visi presiden dan menteri pendidikan akan menentukan arah reformasi pendidikan. Menurut Dye (1972), kebijakan publik pada dasarnya adalah apa yang diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah.

Ekonomi

Kondisi ekonomi negara berpengaruh pada alokasi anggaran pendidikan. Dalam situasi fiskal terbatas, program pendidikan dapat terhambat atau diprioritaskan ulang.

Globalisasi

Tantangan global menuntut sistem pendidikan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan abad 21. Sistem pendidikan tidak bisa lagi eksklusif, tetapi harus terbuka terhadap standar internasional.

Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Tantangan dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Ketimpangan Akses dan Kualitas

Distribusi pendidikan yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan utama. Banyak daerah tertinggal yang belum memiliki sarana, tenaga pengajar, dan infrastruktur memadai. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur’an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."(QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya, termasuk dalam pendidikan.

Resistensi terhadap Perubahan

Kebijakan baru sering menghadapi penolakan dari pelaksana di lapangan seperti guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Hal ini bisa dipicu oleh minimnya sosialisasi atau ketidaksiapan menghadapi perubahan.

Keterbatasan Anggaran

Pendidikan adalah sektor yang sangat tergantung pada pembiayaan negara. Keterbatasan dana seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program strategis, seperti pembangunan sekolah dan pelatihan guru.

Kurangnya Kapasitas SDM

Kualitas sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan, baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pelaksana, masih bervariasi dan tidak selalu selaras dengan tuntutan zaman. Rasulullah bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga."(HR. Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya pengembangan SDM melalui pencarian ilmu dan pelatihan.

Solusi dan Rekomendasi Penguatan Kebijakan

Penguatan Kelembagaan

Institusi pendidikan dan birokrasi yang menangani pendidikan perlu diperkuat dalam hal koordinasi, transparansi, dan efisiensi. Perlu dibangun budaya tata kelola yang akuntabel dan adaptif terhadap tantangan.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program pelatihan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, dan aparatur pendidikan sangat diperlukan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan daring, sertifikasi kompetensi, dan pertukaran praktik baik antar daerah. Sekolah perlu meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang kurikulum merdeka melalui pelaksanaan workshop yang dipraktekkan langsung oleh tenaga tutor serta fasilitator yang sangat mumpuni. Pemerintah juga perlu ikut andil dalam menampung kendala-kendala yang terjadi di lapangan bukan hanya mendorong setiap sekolah mempraktekkan kurikulum terbaru saja melainkan memfasilitasi ketersediaan tenaga tutor atau fasilitator yang dapat terjun langsung memberikan pelatihan dan pendampingan secara simultan. Sehingga tujuan nasional pendidikan melalui penerapan kurikulum merdeka belajar akan dapat dicapai serta mampu menciptakan lulusan yang kompeten sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini(Zuhriyah et al., 2024).

Optimalisasi Teknologi Pendidikan

Pemanfaatan teknologi digital seperti platform pembelajaran daring, sistem manajemen sekolah berbasis web, dan data learning analytics sangat mendukung pemerataan dan efisiensi pembelajaran. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur'an:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

"Dia (Allah) mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-'Alaq: 5) Ayat ini menjadi inspirasi untuk terus mendorong pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan.

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional dalam mendukung pendidikan bisa mempercepat pencapaian tujuan kebijakan. Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya negara.

K. Contoh Kebijakan Pendidikan di Indonesia

a. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kemerdekaan peserta didik dan pendidik dalam menentukan arah pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan program pembelajaran intrakurikuler yang bervariasi. Guru diperbolehkan memilih dari berbagai sumber pengajaran, memungkinkan mereka menyesuaikan pengajaran dengan minat dan kebutuhan belajar siswa (Indriani, 2013). Kurikulum ini juga memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan potensi masing-masing, serta menyesuaikan materi dengan konteks lokal. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur'an:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11) Ayat ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas setiap individu (Efendi et al., 2023).

b. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP merupakan program bantuan tunai pendidikan dari pemerintah kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah mencegah anak putus sekolah dan mendukung pemerataan akses pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa... " (QS. Al-Ma'idah: 2). Ayat ini menekankan pentingnya saling membantu, termasuk dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa (Kristen et al., 2019).

Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan adalah kebijakan yang mendorong integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Hal ini mencakup pengembangan platform digital seperti Merdeka Mengajar, penyediaan perangkat TIK, serta pelatihan guru dalam pengajaran berbasis digital. Hal ini selaras dengan nilai dalam Al-Qur'an:

أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.”(QS. Al-‘Alaq: 1). Ayat ini menjadi simbol transformasi pendidikan berbasis literasi, termasuk literasi digital(Anggraini, 2025).

Kesimpulan

Perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan sebuah proses yang menuntut pendekatan holistik dan berorientasi masa depan. Kebijakan ini harus mampu merespons dinamika global, memahami kebutuhan masyarakat lokal, serta berpijak pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Tidak hanya pada level nasional, pengembangan kebijakan juga harus dilaksanakan secara sinergis di tingkat daerah dan satuan pendidikan agar tujuan pemerataan serta peningkatan mutu benar-benar tercapai, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).Beragam tantangan seperti disparitas akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, keterbatasan sarana, hingga minimnya pelibatan aktor lokal, menunjukkan bahwa model kebijakan yang bersifat top-down sudah tidak cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terbuka, berbasis kebutuhan nyata di lapangan, dan mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan yang tepat harus mempertimbangkan faktor internal seperti kurikulum, kapasitas pendidik, serta infrastruktur pendidikan, dan juga faktor eksternal seperti kondisi politik, ekonomi, serta pengaruh globalisasi. Landasan etika yang bersumber dari nilai-nilai spiritual dan sosial, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, perlu menjadi bagian integral dalam pembangunan kebijakan tersebut.Melalui pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi solusi, pengembangan kebijakan pendidikan diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya bermutu dan setara, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman dan dapat membangun generasi bangsa yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

Daftar Pustaka

- Anggraini, A. D. (2025). Integrasi Teknologi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 402–410. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p402-410>
- Ariyanto, B. (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3066>

- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Efendi, P. M., Tatang Muhtar, & Yusuf Tri Herlambang. (2023). Relevansi Kurikulum Merdeka Dengan Konsepsi Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Dalam Perspektif Filosofis-Pedagogis. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 548–561. <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5487>
- Esha, M. I. (2016). *Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Islam Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*. UIN Maliki-Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/5770/>
- Imam Rohani. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(01), 80–99. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v1i01.33>
- Indriani, S. M. (2013). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Dampak Perubahan Kebijakan Kurikulum Terhadap Guru*. x(x), 1–10. <https://repository.uin-malang.ac.id/18246/>
- Kristen, U., Wacana, S., Binti, W., Sekolah, Y., Agama, T., Negeri, K., Raya, P., Ismanto, B., Univeristas, W., & Wacana, K. S. (2019). Kelolah jurnal manajemen pendidikan Magister Manajemen Pendidikan FKIP Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Kelola. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53.
- Kurniawan, R., Riswan, R., & Hilman, C. (2022). Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.221>
- Subhan Widiyansyah, Serly Putri Hidayat, Sauqi Ichsan Kamil, Ida Dwi Lestari Br Purba, Usy Rahmawati, & Feby Miftah Azmi Khairo. (2024). Kesiapan Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 344–362. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1120>
- Umar Sidiq, M.Ag Wlwin Widyawati, M. P. (2019). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Akuntansi* (Issue Agustus).
- Zuhriyah, I. A., Padil, M., Rabbani, I., & Artikel, R. (2024). *Optimalisasi manajemen pembelajaran dalam keberhasilan kurikulum merdeka*. 7(204), 32–42. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i1.20963>